YOGYAKARTA

SUMBANGSIH PERUSAHAAN TURUT DIAPRESIASI

Pemkot Cegah Kasus Stunting Baru

YOGYA (KR) - Selain melakukan upaya syarakat. Stunting sudah penanganan kasus stunting yang sudah ditemukan, Pemkot Yogya juga mencegah munculnya kasus baru. Peran wilayah yang berhadapan langsung dengan masyarakat pun sangat dibutuhkan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogya Yunianto Dwisutono, menyampaikan fokus intervensi terhadap masalah stunting yang wajib dilakukan adalah perlunya mencegah kasus stunting baru. Untuk itu, perlu melakukan identifikasi faktor risiko stunting sejak awal, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan yang tepat. "Dalam program intervensi stunting di Kota Yogya masingmasing wilayah dan mitra telah memiliki perannya untuk menurunkan prevalensi angka stunting," ujarnya, Jumat (26/5).

Oleh karena itu pihaknya sangat mendukung upaya dari wilayah yang mampu bersinergi dengan berbagai pihak. Salah satu yang baru saja dilakukan

ialah Kemantren Ngampilan yang meluncurkan bantuan bagi keluarga dengan anak stunting dengan melibatkan kalangan perusahaan maupun kampus. Yunianto berharap, dengan peluncuran bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian, sinergi dan kerja sama serta kolaborasi yang baik, sehingga dapat menyelesaikan masalah stunting di Kota Yogya sekaligus menciptakan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak.

"Kota Yogya juga sudah memiliki kesepakatan bersama dengan para stakeholder seperti perusahaan dalam menjalankan program tanggung jawab lingkungan sosial atau CSR. Begitu juga terhadap kalangan perguruan tinggi maupun komunitas ma-

menjadi agenda nasional untuk bisa ditangani dengan baik karena menyangkut masa depan anak-anak," urainya.

Sementara program peluncuran bantuan yang digelar di Kemantren Ngampilan tersebut melibatkan Bakpia 25, RSKIA Rachmi dan STIEKES Bethesda. Lintas stakeholder itu memberikan bantuan kepada lima anak yang terdata stunting di wilayah Kemantren Ngampilan.

Mantri Pamong Praja (MPP) Kemantren Ngampilan Endah Dwi Dinyastuti, menjelaskan penerima bantuan stunting diambil dari data potensi stunting bavi di bawah usia dua tahun dan lima tahun. Data itu dipantau oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) binaan PLKB Kemantren Ngampilan. Adapun bantuan stunting berupa paket beras, telur, kacang hijau, minyak goreng senilai Rp 100.000.

"Kami berharap adanya kerja sama dari semua pihak yang terlibat ini mampu menurunkan angka stunting. Untuk itu perlu kita berikan dedikasi serta

kepedulian masing-masing stunting. Kami juga sudah individu dengan cara memperhatikan segmentasi sasaran dalam kampanye kerja sama dengan KUA, an," terangnya.

memberikan sosialisasi kepada calon pengantin be-

dan kunjungan ke rumah balita stunting melakukan pendamping-

DPRD KOTA YOGYAKARTA SUARA WAKIL RAKYAT

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

PJ WALIKOTA DITUNTUT JELI

Tahun Politik Jangan Abaikan Kebutuhan Warga

YOGYA (KR) - Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Rahario, vang baru saja dilantik pada 22 Mei 2023 lalu dituntut mampu jeli dalam mengendalikan program pembangunan. Kendati bakal disibukkan dengan agenda Pemilu 2024, namun memasuki tahun politik jangan sampai mengabaikan program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Politisi PPP yang duduk di DPRD Kota Yogya M Hasan Widagdo, menilai Kota Yogya memang harus mampu menjadi barometer keberhasilan Pemilu 2024. Sehingga fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah juga harus maksimal. "Tetapi jangan hanya fokus di sana. Program kemasyarakatan tetap harus berjalan secara optimal. Kepala daerah harus mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat," urainya.

Dirinya optimis Pj Walikota yang baru mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Pihaknya di lembaga dewan pun bakal mengawal jalannya pemerintahan M Hasan Widagdo **Politisi PPP**



tersebut. Terutama dengan mengawasi program yang sudah direncanakan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. Rapat-rapat bersama mitra kerja eksekutif akan diintensifkan supaya program kemasyarakatan ti-

dak terganggu dengan agenda di tahun politik.

Di samping itu, Hasan juga menyoroti sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Yogya yang tahun ini hingga tahun depan akan memasuki masa pensiun. Jika tidak disiapkan regenerasi dengan baik maka bisa berpengaruh terhadap rencana program yang seharusnya berialan. "Pi Walikota yang baru juga harus jeli ketika beberapa pejabat di Pemkot mulai pensiun. Kekosongan jabatan jangan dibiarkan terlalu lama. Sesuai kewenangan seorang penjabat, tentu pengisian pejabat perlu rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Ini harus dipersiapkan agar tidak memakan waktu lama," paparnya.

Oleh karena itu Hasan akan terus mendorong keberlangsungan pemerintahan di Kota Yogya. Terutama menyangkut pelayanan publik yang semakin baik. Berbagai masukan juga akan diberikan berkaitan dengan hak-hak masyarakat agar tidak sampai terabaikan.

ANTISIPASI KEBAKARAN SAAT MUSIM KEMARAU

BPBD DIY Beri Pelatihan Sejumlah OPD

YOGYA (KR) - Guna mencegah terjadinya kebakaran saat musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Di antaranya dengan memberikan pelatihan pemadaman kebakaran kepada OPD sampai menyiagakan relawan pemadam kebakaran di kabupaten/kota. Relawan tersebut bertugas mensosialisasikan risiko kebakaran dan melakukan pencegahan dini supaya tidak terjadi kebakaran.

"Untuk jumlah relawan pemadam kebakaran yang sudah masuk data Kemendagri semua ada 830 orang. Rinciannya Kota Yogyakarta ada 483 orang, Bantul 87 orang, Kulonprogo 73 orang, Sleman 172 orang dan Gunungkidul 15 orang. Disamping itu untuk relawan yang sudah mendapat pembekalan namun belum terdata di Kemendagri lebih dari 1.500 orang," kata

Manajer Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD DIY Lilik Andi Aryanto di Yogyakarta, Jumat

Lilik mengatakan, pembentukan relawan sesuai dengan amanat Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2023. Untuk Kota Yogyakarta relawan tersebut dibentuk oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota, Sleman dibentuk oleh BPBD. Sedangkan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo dibentuk oleh Satpol PP. Personel Redkar yang telah mendapat pembekalan teori maupun praktik pemadaman api disiagakan saat memasuki musim kemarau. Karena potensi kebakaran ada kecenderungan mengalami peningkatan saat musim kemarau apabila dibandingkan kondisi normal. Selain melakukan sosialisasi dan pencegahan, mereka memiliki tugas melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran, dan melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.

"Apabila apinya belum besar mereka ikut memdamkan, tetapi kalau api sudah besar dan di luar jangkauan, maka mereka bertugas mensterilkan jalan. Karena biasanya saat kebakaran banyak warga yang menonton," ungkap Lilik.

Lebih lanjut Lilik mengungkapkan, berdasarkan data Pusdalops BPBD DIY

selama tahun 2022 tercatat ada 113 kejadian kebakaran. Dari jumlah tersebut terbanyak ada di Kabupaten Sleman dengan 28 kejadian kebakaran. Sementara, hingga 22 Mei 2023 kejadian kebakaran tercatat sebanyak 48 kejadian.

"Kebakaran di tahun kemarin cukup banyak, yang terbanyak kebakaran permukiman, namun demikian kebakaran lahan, kebakaran hutan ini juga perlu diwaspadai selama kemarau," terang Lilik.

Lebih lanjut Lilik menambahkan, untuk mengurangi risiko kebakaran selama kemarau, meminta masyarakat melakukan sejumlah upaya pencegahan secara mandiri dengan menghindari berbagai aktivitas yang dapat memicu kebakaran. (Ria)-f





